

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara

Arie Supriati

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Abstract: *This study aims to determine the factors that influence political participation in the legislative elections Dimembe District of North Minahasa regency. The method used is descriptive survey. purposive sample using Product Moment correlation analysis research hypothesis that factors affecting Political Participation legislative election in the District of North Minahasa Regency Dimembe r_{xy} or count is 0, compared with 744 r on the importance of table 1% 0,380 and 5% significance of the result is calculated 0.744 0.294 $r > 0.380$ and 0.294 (Regreater of the table) means that the hypothesis is accepted. The factors that influence the Legislative Elections Political Participation in the District of North Minahasa regency Demembe is 55% determined by political socialization, political attitudes and political communication, and 45% is determined by other factors not examined. Legislative Elections Political participation is the people who choose a political party or political office, membership of political organizations to fight for the program through the legislative elections, political socialization, political attitudes and political communication.*

Keywords: *political participation, public, legislative elections*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilu legislatif Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah survey deskriptif. sampel purposive menggunakan analisis korelasi *Product Moment* hipotesis penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik pemilu legislatif di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe r_{xy} atau hitung adalah 0, dibandingkan dengan 744 r tentang pentingnya tabel 1% 0,380 dan 5% signifikansi dari hasil hitung 0,744 0,294 $r > 0.380$ dan 0.294 (*Regreater tabel*) berarti hipotesis diterima. faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilu Legislatif di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Demembe adalah 55% ditentukan oleh sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik, dan 45% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Partisipasi politik Pemilihan Legislatif adalah orang-orang yang memilih partai politik atau jabatan politik, keanggotaan organisasi politik untuk memperjuangkan program melalui pemilihan legislatif, sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik.

Kata Kunci: partisipasi politik, masyarakat, pemilihan legislatif

Kemampuan suatu partai politik dalam memenangkan suatu pemilihan legislatif (DPR/DPRD) sangat menentukan perolehan jumlah suara dan jumlah kursi dalam perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD).

Alamat Korespondensi:

Arie Supriati, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Oleh karena itu peran serta pemilih dalam memberikan suara dan keabsahannya sangat menentukan tingkat tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik. Pasca reformasi, terdapat pergeseran yang signifikan terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia. Partisipasi politik merupakan sangat menentukan iklim demokrasi yang saat ini sementara dibangun untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan berdemokrasi yang dicita-citakan, sehingga peranan

masyarakat yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu kondisi sosial politik masyarakat dan tuntutan masyarakat akan terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan memberikan suatu legitimasi yang memberikan/pengakuan legalitas kekuasaan yang benar-benar merupakan pilihan dari masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggara proses pemilihan ini adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan dilaksanakan secara Demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tugas dan wewenang serta kewajiban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan umum telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Dalam kenyataannya, dukungan suara pemilihan legislatif ditentukan oleh anggota partai, Kader partai, simpatisan partai serta figur calon/sosok kepemimpinan calon yang akan dipilih, faktor kemampuan, pengalaman calon, faktor sosial budaya, faktor penyampaian program visi, misi dari calon legislatif. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kinerja legislatif.

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi yang dipengaruhi oleh:

- Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
- Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

Kualitas anggota DPRD selama ini, berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD

belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini adalah segi karier politik dan segi pendidikan formal. Didukung oleh sistem pemilihan yang belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi peraturan tata tertib, data dan informasi, tingkat pendidikan, pengalaman serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas mekanisme sistem pemilihan umum serta keserasian hubungan antara eksekutif dan legislatif sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2004 meliputi: Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota; Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; Mengadakan Penyelidikan; Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; Mengajukan pernyataan pendapat; Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; Menentukan Anggaran Belanja DPRD; Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut, menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sangatlah penting.

Peran Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) khususnya calon legeslatif pada lembaga pemerintah yaitu MPR/DPR sebagai salah satu agent of change sangat diperlukan guna mendorong lancarnya proses perubahan pada lembaga legeslatif.

Pertama, kemampuan untuk memahami kompetensi lembaga. *Kedua*, Calon legeslatif harus memiliki kemampuan untuk selalu memperbarui pengetahuan teknikal pengelolaan sumber daya manusia. *Ketiga*, Calon legeslatif harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen perubahan, *Keempat*, Calon legeslatif harus mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan ketiga kemampuan tersebut dalam meningkatkan nilai lembaga legeslatif.

Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa utara jumlah penduduknya 22.668 yang terdaftar sebagai pemilih 450 orang dan yang tidak terdaftar 232 orang. Berbagai faktor yang telah mempengaruhi Partisipasi politik pemilihan legislatif di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik agar dapat menunjang partisipasi politik pemilihan legislatif.

Menurut Maran (2006) sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai sistem politik, yang kemudian terjadi gejala-gejala politik. Selanjutnya, sosialisasi politik merupakan proses individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik yang dapat membantu individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, bagaimana cara berpikir agar supaya berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Dengan demikian proses sosialisasi adalah proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan masyarakatnya. Dari proses tersebut seseorang akan memahami cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan menghargainya.

Dari uraian di atas jelas dalam proses tersebut nyata bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya dalam suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud dalam pola-pola dan kaidah-kaidah tertentu.

Tidak semua tindakan atau perilaku seseorang identik dengan sikap yang ada padanya, sebab dapat saja seseorang kemungkinan melakukan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan sikapnya yang seharusnya atau karena situasi dan kondisi yang ada mengharuskan ia melibatkan diri secara langsung walaupun bertentangan dengan kemauannya.

Komunikasi politik sebagai mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia yang dapat mengembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya. Hal ini mencakup wajah, sikap dan gerak gerik, suara kata-kata tertulis, percetakan, kereta api, telegram. Telepon dan apa

saja yang merupakan penemuan muthakhir untuk menguasai ruang dan waktu. Artinya, komunikasi adalah pertukaran informasi dan pengirimnya kedalam suatu arti yang sangat penting dalam sebuah sistem sosial atau dalam sistem organisasi.

Komunikasi akan menduduki tempat utama (Sentral) sebab struktur itu bersifat luas dan ruang lingkup dari masalah organisasi juga sepenuhnya ditentukan oleh teknik komunikasi. Pendekatan ini menempatkan sistem komunikasi sebagai jantung dari organisasi yang bertujuan mengorganisir dalam memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam. mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar organisasi.

Tujuan utama komunikasi adalah memberikan informasi, mendidik dan menerangkan informasi agar mereka terpengaruh dan berubah sikap sesuai dengan kehendak komunikator. Kita mengetahui bahwa para anggota setiap organisasi bukan manusia yang seragam tetapi mempunyai perbedaan-perbedaan atas dasar jenis pekerjaan (tugas dan fungsi) tanggung jawab serta wewenang. Bahkan berbeda pula dalam sifat-sifat pribadi berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan sikap perilaku terhadap isu tertentu. Komunikasi di dalam suatu organisasi memiliki beberapa arah yaitu ke bawah, ke atas, ke samping dan keluar yang dapat berupa pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi.

Maran (2006) menyatakan bahwa hirarkhi yang terdapat dalam Partisipasi politik yang tergantung dari akibat yang disebabkan terhadap sistem politik memiliki tingkatan partisipasi sebagai berikut: a) Menduduki jabatan politik atau administratif, b) Mencari jabatan politik atau administratif, c) Keanggotaan pasif suatu partai politik, d) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, e) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya, f) Partisipasi dalam diskusi politik, g) Voting (Pemberian suara).

Selama ini rekrutment politik dikalangan masyarakat kita masih tertutup. masih diwarnai oleh suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya *self reproducing class* (pergantian yang hanya dari kalangan sendiri) Dalam mekanisme demikian sebuah prestasi

atau kemampuan lebih yang dimiliki seseorang belum cukup mengantarkannya menyandang sebutan elit. Dalam kehidupan masyarakat kita masih dibingkai oleh sebuah sistem yang lazim disebut patriarkhat yaitu suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang lebih dominan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu untuk menganalisis pengaruh sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik dapat mempengaruhi partisipasi politik Pemilihan legislatif di kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

Hipotesis Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bahwa faktor sosialisasi politik, faktor sikap politik dan faktor komunikasi politik mempengaruhi partisipasi politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Dimebe Kabupaten Minahasa Utara.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode survei digunakan sebagai upaya mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ikut dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 450 pemilih.

Karakteristik yang menjadi Sampel adalah penduduk yang memang memiliki hak untuk melakukan pemilihan legislatif dari jumlah pemilihnya 450 pemilih. Untuk menentukan sampel yang dapat mewakili populasi dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah 45 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi yang memadai maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, Kuesioner atau angket serta kepustakaan.

Teknik Analisis Data menggunakan teknik analisa korelasi Product Moment.

HASIL

Setelah selesai mengadakan penelitian di lapangan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Faktor Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Dimebe Kabupaten Minahasa Utara, maka setelah data dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh, maka peneliti mengadakan pengecekan terhadap angket yang disebar dengan menentukan skor yaitu bila menjawab a diberi nilai 4, bila menjawab b, diberi nilai 3, bila menjawab c, diberi nilai 2, bila menjawab d diberi nilai 1. Kemudian setelah data-data angket itu terkumpul diolah dengan tabulasi dan pembuatan tabel kerja yaitu:

Diketahui:

$$\begin{aligned}\Sigma X &= 1029, \quad \Sigma Y = 1131, \quad \Sigma Y^2 = 23871 \\ \Sigma X^2 &= 28543 \quad \Sigma XY = 26011 \quad \Sigma n = 45\end{aligned}$$

$$r_{xy} = \frac{xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n}}{\sqrt{\frac{(\Sigma x^2)(\Sigma x)^2}{n} \frac{(\Sigma y^2)(\Sigma y)^2}{n}}}$$

$$r_{xy} = \frac{26011 - \frac{(1929)(1131)}{45}}{\sqrt{\frac{(28543)(1929)^2}{n} \frac{(23871)(1131)^2}{n}}}$$

$$r_{xy} = 0,744$$

Untuk mengetahui berapa besarnya daya determinasi atau tingkat kepercayaan maka rumusnya adalah:

$$\begin{aligned}r &= r_{xy} \times r_{xy} \times 100\%, \\ r &= 0,744 \times 0,744 \times 100\% \\ r &= 55\%\end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Sosialisasi sikap politik dan komunikasi politik mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Demembe Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan hasil penelitian melalui analisa produk moment maka hasilnya r_{xy} atau r_{hitung} adalah 0,744 apabila dibandingkan dengan r_{tabel} pada signifikansi 1% 0,380 dan signifikansi 5% 0,294 maka hasilnya

adalah $r_{hitung} = 0,744 > 0,380$ dan $0,294$ (lebih besar dari r_{tabel}) berarti hipotesa diterima

Oleh karena itu untuk mengetahui daya determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Demebe Kabupaten Minahasa Utara hasilnya adalah 55% berarti Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Dimebe Kabupaten Minahasa Utara 55% ditentukan oleh sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik dan 45% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Partisipasi Politik pemilihan legislatif adalah kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan politik. Oleh karena itu Partisipasi politik yang tergantung dari akibat yang disebabkan oleh tingkat partisipasi apakah menduduki jabatan politik keanggotaan suatu organisasi politik. Hal ini jelas bahwa partisipasi adalah begitu penting dalam sebuah sistem politik demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi itu sendiri mengasumsikan bahwa yang paling mengetahui tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan partisipasi secara terus menerus dari masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik bagi dirinya.

Masyarakat berupaya untuk menunjukkan apa yang dianggap baik bagi dirinya (sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya) dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, seperti memilih partai politik yang mengangkat isu sesuai dengan preferensinya, memilih kandidat yang memperjuangkan program sesuai dengan prioritasnya, mempengaruhi protes pembuatan kebijakan yang sedang menjadi agenda publik. Namun sebaliknya ada yang kurang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif karena klonsekuensi negatif dari aktivitas politik, kurang adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif sehingga perlu sosialisasi politik. Melalui sosialisasi seorang individu dapat mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai sistem politik, yang kemudian menjadi gejala-politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwaterdapat faktor sosialisasi politik sikap politik dan komunikasi politik yang mempengaruhi

Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Demembe Kabupaten Minahasa Utara

Partisipasi Politik pemilihan legislatif adalah kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan politik melalui sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik yang tergantung pada sebuah sistem politik demokrasi. Melalui sosialisasi politik, masyarakat memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sebagai suatu sikap politik yang selanjutnya untuk dapat mengadakan komunikasi politik sehingga dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilihan legislatif.

Saran

Dalam organisasi politik perlunya sosialisasi politik ditingkatkan terus agar masyarakat memperoleh pengetahuan sehingga menghasilkan tingkah laku politik bagi masyarakat. Perlunya merubah sikap politik masyarakat agar dapat melahirkan suatu tindakan dalam usaha melakukan komunikasi politik dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam politik pemilihan legislatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. 1998, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faturachman. 2001. *Sistim Politik di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Johnson, D.P. 1986, *Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Luthans, F. 2002. *Organizational Behavior*, seventh edition McGraw-Hill Singapore,
- Marijan, K. 2006, *Demokratisasi di Daerah*, Cetakan pertama. Surabaya: Pustaka Eureka & Pusdeham.
- Maran, R. 2006. *Pengantar Sosiologi Politik*. Cetakan 5. Jakarta: Rineke Cipta.
- Roucek, J.S. 1986. *Pengendalian Sosial*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Shadily, H. 1998, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. PT. Gunung Sahari Djakarta.
- Satjipto. R. 1997, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soemardjan, S. 1995. *Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamika Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudjana. 1986. *Metode Statistika*, Penerbit tarsito bandung, UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, LPU, Jakarta.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, KPU Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.